

PENGARUH BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI ACEH

¹⁾ Mulia Andirfa, ²⁾ Dr. Hasan Basri, M.Com, CA, ³⁾ Dr. M.Shabri A.Majid, SE, M.Ec

¹⁾ Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3)} Staff Pengajar Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan daerah; (2) pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan daerah; (3) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah; (4) dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini yaitu 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh yang telah memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2011-2013. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten dan Kota provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang kinerja keuangan yang mengalami kapasitas fiskal yang rendah. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah, dimana daerah masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintahan pusat sehingga daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif (belanja modal). *Public Expenditure Analysis And Capacity Strengthening Program* (PECAPP) menilai Penerimaan Aceh secara riil meningkat 17 persen dalam dua tahun terakhir setelah mengalami penurunan di tahun 2009. Tahun 2012 penerimaan keseluruhan pemerintah di

Aceh terhitung sebesar Rp. 21 triliun, meningkat 31 persen dari tahun 2005. Peningkatan penerimaan Aceh pada tahun 2012 juga sejalan dengan trend peningkatan APBD secara nasional. Sementara untuk tahun 2012 belanja Pemerintah Aceh meningkat seiring dengan peningkatan penerimaan daerah. Belanja keseluruhan terhitung secara riil sebesar Rp. 19 triliun atau meningkat 70 persen jika dibandingkan tahun 2005, yang tercatat sebesar Rp. 7 triliun. Belanja pemerintah provinsi tercatat sebesar Rp. 9.5 triliun atau 50 persen dari keseluruhan belanja pemerintah. Belanja untuk pemerintahan umum cenderung meningkat dan memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja Aceh. Alokasi belanja ini secara riil meningkat terhitung dari Rp. 6,2 triliun di tahun 2011 menjadi Rp. 6.8 triliun

pada tahun 2012 atau 36 persen dari keseluruhan belanja pemerintah di Aceh.

Sama dengan daerah lain di Indonesia, dana perimbangan merupakan sumber utama penerimaan pemerintah di Aceh. Dana perimbangan terhitung mencapai 75 persen dari keseluruhan penerimaan pemerintah di Aceh, "tidak termasuk dana otonomi khusus. Apabila termasuk dana otsus, penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat tercatat sebesar 82 persen. Penerimaan DAU tercatat sebesar Rp. 7,7 triliun, meningkat secara riil sebesar Rp. 141 miliar dibandingkan dengan tahun 2011. Sementara penerimaan dana otsus tercatat sebesar Rp. 6,2 triliun, juga meningkat secara riil sebesar Rp. 659 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tahun 2008 hingga 2012, penerimaan dana otsus secara keseluruhan terhitung sebesar Rp. 24,8 triliun. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) secara riil cenderung stagnan, bahkan menurun secara riil di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Penerimaan riil dari PAD sebesar 1,2 triliun pada tahun 2008 menurun menjadi Rp. 1 triliun pada tahun 2012. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan pemerintah pada tahun 2012 hanya sebesar 6 persen dari total penerimaan Aceh, menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang terhitung sebesar 7 persen. Minimnya penerimaan PAD menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan provinsi Aceh pada sumber fiskal dari transfer pemerintah pusat. Hal ini sama dengan daerah lain di Indonesia, dimana PAD secara rata-rata hanya menyumbangkan 10 persen dari keseluruhan

penerimaan daerah.

Sementara menurut Muhammad (2014), menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari total 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Sebanyak 14 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Aceh masih mendapatkan predikat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK. Temuan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih buruk dan dapat dinilai belum baik. Salah satu instrumen untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dan disahkan (Halim, 2007:230).

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Daerah

Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Sedangkan, dalam pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi, maka proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur

dengan rasio output dengan input (Mardiasmo, 2009). Input adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas. Sedangkan, output adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Input atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk satuan uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun fisik (Mardiasmo, 2009). Rasio Efisiensi, Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006). Alokasi biaya ditransformasikan ke rasio efisiensi yaitu: Perhitungan rasio efisiensi terhadap kinerja keuangan dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{Efisiensi} = ((\text{Realisasi Pengeluaran}) / (\text{Realisasi Penerimaan})) \times 100\% \dots\dots\dots$$

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Mardiasmo, 2009).

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH, Dana

Alokasi Umum (DAU, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dana perimbangan secara rata-rata di daerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80 persen dari penerimaan daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat menstransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah sejumlah nilai uang yang diterima dari masyarakat/ sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri selama tahun takwin (kalender), guna membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran baik pengeluaran rutin dan selebihnya dipergunakan untuk biaya pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Investigasi. Penelitian ini bersifat kausalitas (*causal study*), yaitu dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah, yang bertujuan untuk menguji hipotesis (*hypothesis testing*) yang telah dikembangkan berdasarkan teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. Dengan unit analisis penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh yang menerbitkan laporan keuangan dan realisasi anggaran pemerintah daerah atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) Kabupaten dan Kota, dimana terdiri dari 18 (delapan belas) kabupaten dan 5(lima) kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini memiliki periode waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 69 (23 kabupaten/kota x 3 tahun).

Tabel 1:
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Pengukuran Variabel
KKD	$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$
BM	Ln Total Realisasi Belanja Modal
DP	Ln Total Realisasi Dana Perimbangan
PAD	Ln Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan model persamaan sebagai berikut :

$$KKD_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LnBM}_{it} + \beta_2 \text{LnDP}_{it} + \beta_3 \text{LnPAD}_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- KKD = Kinerja Keuangan Daerah
- BM = Belanja Modal
- DP = Dana Perimbangan
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- α = Konstanta
- ε = Tingkat kesalahan pengganggu
- it = Kabupaten/ Kota i pada tahun t

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil populasi pada seluruh kabupaten dan kota di provinsi aceh sebanyak 23 kabupaten dan kota. Dengan periode waktu dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Kriteria yang dijadikan pemilihan populasi adalah kabupaten dan kota yang telah memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi tidak terdapat masalah dalam pengujian tersebut. Sehingga hasil analisis regresi linier berganda terhadap variabel- variabel penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut pada Tabel 3.

Tabel 3.

Koefisien pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	83.813	43.504	.369	.136
BM	4.597	1.495	3.076	.003
DP	-4.076	2.174	-1.875	.065
PAD	.274	.868	.315	.754

Sumber : Data Diolah (2016)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y=83,813+Ln4,597-Ln4,076+Ln0,274$$

Dari persamaan dan hasil output diatas dapat diketahui hasil nilai koefisien regresi sebagai berikut: (a) Konstanta sebesar 83,808 artinya jika belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dianggap konstan, maka besarnya nilai kinerja keuangan daerah adalah 83,808 pada satuan skala likert; (b) Koefisien regresi BM (Belanja Modal) sebesar 4,597 artinya setiap penerimaan 100% peningkatan BM (Belanja Modal), maka akan diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 459,7%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan); (c) Koefisien regresi DP (Dana perimbangan) sebesar -4,076 artinya setiap penerimaan 100% peningkatan DP (Dana perimbangan), maka akan diikuti oleh penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar -407,6%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan); (c) Koefisien regresi PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0,274 artinya setiap penerimaan 100% peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), maka akan diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan pemerintah

daerah sebesar 27,4%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan).

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Tabel 4
Hasil Uji Determinansi dan Korelasi

F	Sig.	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
3,424	0,022	0,369	0,136	0,097	3,611

Sumber : Data sekunder diolah (2016)

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau *F-test*, diperoleh F hitung sebesar 3,424 dengan tingkat signifikansi 0,022 berada di bawah signifikansi regresi yaitu 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Pengaruh secara simultan dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2). Hasil pengujian pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh secara simulatan diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) 0,136. Nilai R Square (R^2) 0,136. Nilai ini menunjukkan bahwa BM, DP dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 13,6%, sisanya 86,4% dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Koefisien korelasi (R) = 0,369 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sebesar 36,9%, artinya Belanja Modal (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) mempunyai hubungan dengan

kinerja keuangan daerah pada 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

***Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial
Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja
Keuangan Daerah***

Hasil penelitian variabel Belanja Modal (BM) diperoleh nilai koefisien $\beta_1 = 4,597$ pada tingkat signifikan $0,003 (<0,05)$. Dengan demikian $H_{a1} : \beta_1 \neq 0$ yaitu $4,597 > 0$ sehingga H_{a1} diterima dan menolak H_0 . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Belanja Modal (BM) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Koefisien regresi BM (Belanja Modal) sebesar $4,597$ artinya setiap penerimaan 100% peningkatan BM (Belanja Modal), maka akan diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar $459,7\%$. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan).

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel BM (Belanja Modal) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa kenyataan Pemerintah Daerah dengan semakin meningkatnya alokasi belanja modal, maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat

dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan.

***Pengaruh Dana Perimbangan terhadap
Kinerja Keuangan Daerah***

Hasil penelitian variabel Dana Perimbangan (DP) diperoleh nilai koefisien $\beta_2 = -4,076$ pada tingkat signifikan $0,065 (<0,10)$. Dengan demikian $H_{a2} : \beta_2 \neq 0$ yaitu $-4,076 > 0$ sehingga H_{a2} diterima dan menolak H_0 . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Perimbangan (BM) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Koefisien regresi DP (Dana perimbangan) sebesar $-4,076$ artinya setiap penerimaan 100% peningkatan DP (Dana perimbangan), maka akan diikuti oleh penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar $-407,6\%$. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan). Diperoleh nilai $\beta_2 = -4,076$, dengan demikian $H_{a2} : \beta_2 \neq 0$ yaitu $-4,076 > 0$ sehingga H_{a2} diterima dan menolak H_0 . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Perimbangan (DP) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Artinya setiap 1% perubahan variabel Dana Perimbangan, maka secara relatif akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah $4,08\%$.

Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil dari Hidrokarbon dan Sumber daya lain DAU, DAK dan Dana Otonomi Khusus merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah, maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah, maka Pemerintah Pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan Pemerintah Daerah menurun.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai koefisien $\beta_3 = 0,274$ pada tingkat signifikan $0,754 (<0,05)$. Dengan demikian $H_{a3} : \beta_3 \neq 0$ yaitu $0,274 > 0$ sehingga H_{a3} ditolak dan menerima H_0 . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Diperoleh nilai $\beta_3 = 0,274$ dengan demikian $H_{a3} : \beta_3 \neq 0$ yaitu $0,274 > 0$ sehingga H_{a3} ditolak dan menerima H_0 . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan

bahwa secara parsial variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Artinya setiap perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah, maka secara statistik tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Telah diketahui bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah harus meningkatkan PAD daerahnya masing-masing guna peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 27,4%. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dengan kemampuan PAD membiayai belanja langsung non-pegawai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa baik atau buruknya kinerja keuangan suatu daerah dapat ditentukan dari pendapatan yang diterima daerah tersebut. Sebagai contoh, PAD yang diterima Kota Subulussalam pada tahun 2012 dengan nilai minimum yakni sebesar Rp.6.009.446.461,00, yang merupakan PAD paling rendah dari 23 kabupaten/kota lainnya selama periode 2011-2013. Sedangkan PAD yang paling tinggi diterima oleh kota Banda Aceh pada tahun 2013 yakni dengan nilai maksimum sebesar Rp.129.170.160.562,00, yang merupakan PAD paling tinggi dari 23 kabupaten/kota lainnya selama periode 2011-

2013. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Namun hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Saran

Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan pengujian kembali untuk melihat konsistensi penelitian ini dengan penelitian berikutnya dengan menambah:

1. Variabel lainnya seperti pendapatan daerah dan belanja daerah lainnya serta Indikator rasio kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan menggunakan Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin dan Rasio Keserasian.

Untuk pemerintah daerah kabupaten dan kota agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan tujuan agar dapat membiayai belanja daerahnya sendiri sehingga mengurangi transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya. Dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah Pemda harus lebih giat menggali lebih banyak sumber-sumber pendapatan yang potensial bagi daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kemampuan untuk memenuhi belanja daerah membuktikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah S, Halim A. 2006. *Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Republik Indonesia (2008).
- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, BPFE, Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Erlangga
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 3, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi III, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Halim, Abdullah. dan Abdullah, Syukri. 2006. *Hubungan dan Masalah*

- Keagenan di Pemerintahan Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1: 53-64.
- Halim, Abdullah. 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdullah. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit STIM.YPKN: Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Formalitas Laporan Kinerja Pejabat Publik*. <http://.jsa.akuntan.com>. accessed 02/12/2009.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*: Penerbit ANDI.Yogyakarta.
- Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP). 2013. *Analisa Belanja Publik Aceh 2012*. Melalui <http://analisadaily.com/news/2013/27241/sdm-penyebab-penyimpangan-anggaran-aceh> [02/02/13]
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, *tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 *tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, *tentang pengelolaan keuangan daerah*.
- Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research methods for business. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Buku I & II, Jakarta: Salemba Empat
- Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Airlangga University Press. Surabaya
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*: Tesis Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Semarang
- www.djpkpd.go.id dan www.sikd@djapk.go.id
- www.belanjapublikaceh.org
www.academi.edu.com